

STRATEGI INFRASTRUKTUR DALAM MENDORONG PEREKONOMIAN DI DESA PANYIRAPAN KECEMATAN BAROS

1. Pauzan¹, Muhamad Faizal², Mutia Mawarda³

¹²³⁴ Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni, 2025

Revised Juni, 2025

Accepted Juni, 2025

Available online Juni, 2025

pauzannavis@gmail.com,

faizalmuhamad177@gmail.com,

mutiamawara064@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas
Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji strategi peningkatan infrastruktur untuk mendorong perekonomian di Desa Panyirapan, Kecamatan Baros, yang memiliki potensi ekonomi namun terhambat oleh kesenjangan infrastruktur yang kritis. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini menemukan adanya paradoks antara capaian pembangunan infrastruktur pemukiman (75% jalan desa telah beton) dengan kondisi infrastruktur produksi (jalan usaha tani) yang rusak berat. Kondisi ini secara langsung menyebabkan lonjakan biaya logistik pertanian hingga 100% dan mengisolasi pelaku UMKM akibat keterbatasan akses internet. Berdasarkan analisis mendalam, dirumuskan tiga strategi prioritas yang terintegrasi: (1) Peningkatan konektivitas rantai pasok melalui perkerasan jalan usaha tani dan penguatan akses digital; (2) Pembangunan ekosistem ekonomi lokal dengan mendirikan pasar desa yang dikelola oleh BUMDes yang perannya diperluas; dan (3) Optimalisasi sumber daya alam (mata air) dan peningkatan infrastruktur sosial yang inklusif (Posyandu Lansia). Implementasi strategi ini direkomendasikan

melalui mekanisme partisipatif berbasis Musyawarah Desa dengan pendanaan dari optimalisasi Dana Desa dan kemitraan eksternal.

Kata Kunci: Strategi Pembangunan, Infrastruktur Perdesaan, Ekonomi Lokal, Pembangunan Partisipatif, BUMDes, Desa Panyirapan

ABSTRACT

This study examines infrastructure improvement strategies to foster economic development in Panyirapan Village, Baros District, a village with significant economic potential hindered by critical infrastructure gaps. Using a qualitative approach with a case study method, this research identifies a paradox between the progress in residential infrastructure (75% of village roads are paved) and the severely damaged condition of production infrastructure (farm-to-market roads). This condition directly causes a 100% surge in agricultural logistics costs and isolates MSMEs due to limited internet access. Based on an in-depth analysis, three integrated priority strategies are formulated: (1) Enhancing economic supply chain connectivity through the paving of farm-to-market roads and strengthening digital access; (2) Building a local economic ecosystem by establishing a village market managed by an expanded-role Village-Owned Enterprise (BUMDes); and (3) Optimizing natural resources (water springs) and improving inclusive social infrastructure (elderly healthcare services). The implementation of these strategies is recommended through a participatory mechanism based on Village Forums (Musyawarah Desa), funded by optimizing the Village Fund and external partnerships.

*Corresponding author

E-mail addresses: pauzannavis@gmail.com



Keywords: *Development Strategy, Rural Infrastructure, Local Economy, Participatory Development, BUMDes, Panyirapan Village*

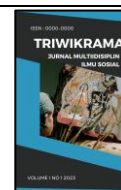
1. PENDAHULUAN

Kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri merupakan amanat reformasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Melalui kebijakan ini, desa diberikan otonomi untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina kemasyarakatan, serta memberdayakan masyarakatnya berdasarkan prakarsa local (Bender, 2016). Tujuan utama dari pembangunan desa, sebagaimana ditegaskan dalam regulasi tersebut, adalah peningkatan kesejahteraan, peningkatan kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan. Kebijakan ini sejalan dengan paradigma pemerintahan saat ini yang menekankan pembangunan Indonesia dari "pinggiran", di mana desa tidak lagi diposisikan sebagai objek, melainkan sebagai subjek pembangunan yang aktif (Mahadiansar et al., 2020).

Dalam kerangka pembangunan tersebut, ketersediaan infrastruktur dasar memegang peranan vital sebagai fondasi bagi pertumbuhan ekonomi wilayah. Infrastruktur yang memadai, mulai dari akses transportasi hingga jaringan komunikasi, merupakan prasyarat untuk membuka isolasi wilayah, meningkatkan produktivitas, dan memperlancar arus barang dan jasa (Putri et al., 2024). Tanpa dukungan infrastruktur yang layak, potensi ekonomi sebegus apa pun akan sulit untuk dikembangkan secara optimal, sehingga menyebabkan terjadinya kesenjangan pembangunan dan sulitnya mencapai kemandirian ekonomi di tingkat desa.

Desa Panyirapan, yang terletak di Kecamatan Baros, adalah sebuah potret desa dengan potensi ekonomi yang menjanjikan. Desa ini tidak hanya didukung oleh sektor pertanian padi sawah yang menjadi mata pencaharian utama, tetapi juga memiliki keunikan berupa produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kerajinan sapu ijuk yang memiliki nilai jual. Akan tetapi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa berbagai potensi tersebut belum mampu mengangkat perekonomian desa secara signifikan akibat adanya berbagai hambatan infrastruktur yang mendasar (Ni Putu Indriyani, Piers Andreas Noak, 2018).

Secara spesifik, beberapa tantangan utama yang dihadapi Desa Panyirapan dapat diidentifikasi. Pertama, kondisi jalan usaha tani yang masih berupa tanah dan rusak parah menyebabkan tingginya biaya logistik untuk mengangkut hasil panen, yang pada akhirnya menggerus pendapatan petani. Kedua, tidak adanya pasar desa yang berfungsi sebagai sentra ekonomi membuat petani dan pelaku UMKM sangat bergantung pada tengkulak dan kehilangan potensi pendapatan dari penjualan langsung. Ketiga, keterbatasan akses internet di sebagian besar wilayah desa menjadi penghalang serius bagi generasi muda dan pelaku usaha untuk beradaptasi dengan ekonomi digital dan memperluas jangkauan pemasarannya. Oleh karena itu, upaya peningkatan infrastruktur di Desa Panyirapan harus dipandang bukan sekadar sebagai proyek fisik, melainkan sebagai sebuah investasi strategis untuk menggerakkan roda perekonomian. Infrastruktur yang tepat sasaran akan menciptakan efek berganda (*multiplier effect*), seperti mendorong munculnya usaha-usaha baru dan meningkatkan daya saing produk lokal. Hal ini sejalan dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-8 yaitu menyediakan pekerjaan yang layak dan mendukung pertumbuhan ekonomi (Febriani & Samudra, 2023). Agar efektif, perumusan strategi peningkatan infrastruktur ini menuntut pendekatan yang komprehensif dan partisipatif. Alokasi Dana Desa harus diarahkan pada program-program yang paling mendesak dan memberikan dampak terbesar berdasarkan musyawarah dan kebutuhan nyata masyarakat. Pelibatan aktif warga dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan melalui skema padat karya tunai, tidak hanya akan



menjamin rasa memiliki terhadap hasil pembangunan, tetapi juga dapat menjadi solusi penyerapan tenaga kerja local (Wijaya, 2020).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (*case study*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam dan holistik fenomena "strategi peningkatan infrastruktur" dalam konteks spesifik yang nyata, yaitu di Desa Panyirapan, Kecamatan Baros (Ilhami et al., 2024). Metode studi kasus memungkinkan peneliti untuk menggali kompleksitas masalah, interaksi antaraktor, dan dinamika sosial-ekonomi yang tidak dapat ditangkap oleh angka semata.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui dua teknik utama. Pertama, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan para informan kunci yang dipilih secara purposif. Informan tersebut terdiri dari pihak Pemerintah Desa (Sekretaris Desa), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, perwakilan petani, serta pelaku UMKM (khususnya pengrajin sapu ijuk) untuk mendapatkan perspektif yang beragam. Proses wawancara dipandu oleh instrumen semi-terstruktur yang memberikan fleksibilitas untuk mengeksplorasi jawaban informan secara lebih mendalam. Kedua, observasi partisipatif, di mana peneliti terjun langsung ke lokasi untuk mengamati dan mencatat kondisi faktual infrastruktur (seperti kondisi jalan usaha tani dan kualitas sinyal internet), serta mengamati aktivitas ekonomi warga yang relevan (misalnya, proses pengangkutan hasil panen dan kegiatan jual-beli tanpa adanya pasar desa). Seluruh kegiatan observasi ini didukung oleh dokumentasi berupa foto dan catatan lapangan (*field notes*). Untuk melengkapi data primer, digunakan pula data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen. Dokumen-dokumen yang relevan dianalisis, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Panyirapan, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun berjalan, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta data monografi dan statistik dari publikasi "Kecamatan Baros Dalam Angka" yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Analisis data dalam penelitian ini mengadopsi model interaktif dari Miles, Huberman, & Saldaña (Citriadin, 2020), yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang berlangsung secara simultan: (1) Reduksi Data, yaitu proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengabstraksikan data mentah dari transkrip wawancara dan catatan lapangan menjadi tema-tema dan pola-pola yang bermakna; (2) Penyajian Data (*Data Display*), yaitu menyajikan data yang telah direduksi ke dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis, yang didukung oleh kutipan-kutipan wawancara untuk memperkuat argumen; dan (3) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*), yaitu proses memberikan makna pada data yang telah disajikan dan mencari hubungan antartema untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Untuk menjamin keabsahan dan kredibilitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi (Mekarisce, 2020). Secara spesifik, digunakan triangulasi sumber (dengan membandingkan data dari informan yang berbeda, misalnya Pemerintah Desa vs. Petani) dan triangulasi teknik (dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan data hasil observasi dan analisis dokumen). Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat menyajikan rekomendasi strategi yang komprehensif, berbasis bukti, dan aplikatif bagi Pemerintah Desa Panyirapan serta para pemangku kepentingan lainnya dalam upaya mendorong perekonomian desa melalui pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Infrastruktur Di Desa Payirapan Kecamatan Baros

Berdasarkan temuan di lapangan, kondisi infrastruktur di Desa Panyirapan menunjukkan gambaran yang paradoks: di satu sisi terdapat kemajuan pada infrastruktur dasar di area pemukiman, namun di sisi lain masih ada kesenjangan kritis pada infrastruktur produksi yang secara langsung menghambat potensi ekonomi. Kondisi ini menegaskan kembali teori pembangunan bahwa ketersediaan infrastruktur yang merata dan tepat sasaran merupakan prasyarat mutlak bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif (A.A. Ngurah Gede, 2022).

Keterbatasan paling signifikan ditemukan pada infrastruktur jalan. Meskipun data dari pemerintah desa menunjukkan capaian yang baik, di mana sekitar 75% jalan desa dan lingkungan telah menggunakan beton atau paving block, keluhan utama masyarakat justru terfokus pada jalan yang rusak. Observasi mengonfirmasi bahwa jalan yang hancur ini adalah jalan usaha tani, yang merupakan akses vital bagi petani untuk mengangkut hasil panen mereka. Kondisi ini menghambat aksesibilitas sektor ekonomi utama desa, meningkatkan biaya transportasi secara signifikan, dan pada akhirnya menurunkan produktivitas pertanian. Fakta bahwa Balai Pekerja Umum telah melakukan pengukuran menandakan adanya pengakuan atas masalah ini, namun eksekusinya yang tertunda menjadi bukti nyata adanya *bottleneck* dalam pembangunan.

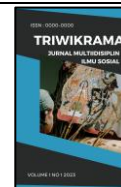


Gambar 1. Kondisi jalan beton Desa Panyirapan



Gambar 2. Kondisi jalan paving block Desa Panyirapan

Dari sisi sumber daya air, Desa Panyirapan memiliki kondisi yang unik dan berpotensi besar. Berbeda dengan banyak desa lain yang mengalami kelangkaan, desa ini dianugerahi sumber mata



air yang melimpah di berbagai lokasi. Namun, potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal. Belum adanya sistem perpipaan yang terkelola dengan baik untuk distribusi air bersih ke seluruh rumah tangga maupun sistem irigasi modern menunjukkan adanya masalah dalam manajemen sumber daya. Ini adalah sebuah ironi di mana kelimpahan sumber daya alam belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan sanitasi dan peningkatan produktivitas pertanian.

Terkait akses listrik, jaringan utama PLN telah menjangkau desa. Akan tetapi, ditemukan bahwa sekitar 30 rumah tangga belum memiliki meteran KWh sendiri dan masih bergantung pada sambungan dari rumah lain. Hal ini mengindikasikan bahwa masalah yang dihadapi bukanlah ketersediaan jaringan, melainkan keterjangkauan dan legalitas akses bagi sebagian masyarakat berpenghasilan rendah. Kondisi ini berisiko menciptakan masalah sosial dan menghambat kegiatan ekonomi skala rumah tangga yang bergantung pada listrik. Sementara itu, akses internet menunjukkan adanya kesenjangan digital yang jelas, di mana sinyal yang stabil hanya terpusat di sekitar kantor desa. Keterbatasan ini mengisolasi sebagian besar warga dari akses terhadap informasi, pasar digital, dan peluang ekonomi baru, yang sangat krusial di era modern.

Dampak Infrastruktur terhadap Perekonomian Desa

Keterbatasan infrastruktur di Desa Panyirapan secara langsung dan signifikan memberikan dampak negatif berlapis terhadap denyut perekonomian lokal. Dampak ini tidak hanya menghambat laju pertumbuhan, tetapi juga menekan profitabilitas sektor-sektor ekonomi yang menjadi tumpuan hidup masyarakat. Temuan ini secara empiris mendukung kerangka teori fungsi produksi (Komparasiperspektif & Seth, 1986), di mana rendahnya ketersediaan modal publik (infrastruktur) terbukti menurunkan produktivitas dan efisiensi modal swasta dan tenaga kerja.

Dampak paling parah dan terasa langsung dialami oleh sektor pertanian akibat buruknya kondisi jalan usaha tani. Sebagaimana terungkap dalam keluhan utama masyarakat, jalan yang hancur menjadi disinsentif ekonomi bagi para petani. Seorang petani dalam wawancara mengungkapkan bahwa biaya transportasi untuk mengangkut hasil panennya telah melonjak hingga dua kali lipat akibat kerusakan jalan. Kenaikan biaya logistik ini secara langsung menggerus margin keuntungan yang seharusnya diterima petani, mengurangi kemampuan mereka untuk berinvestasi kembali pada musim tanam berikutnya, dan pada akhirnya dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan rumah tangga petani. Fenomena ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan produksi pertanian akan selalu terhambat oleh inefisiensi dalam rantai pasca-panen jika tidak didukung oleh perbaikan infrastruktur yang paling mendasar.

Di sektor ekonomi *off-farm*, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dampak keterbatasan infrastruktur terasa dalam bentuk isolasi pasar dan hambatan digital (Hamzah, 2022). Para pelaku usaha, seperti pengrajin sapu ijuk, mengalami kesulitan dalam memasarkan produk mereka secara lebih luas. Keterbatasan akses internet yang stabil di luar area pusat desa membuat mereka kesulitan memanfaatkan platform media sosial dan *e-commerce*. Rencana pemerintah desa pada tahun sebelumnya untuk membuat aplikasi khusus bagi UMKM yang akhirnya dibatalkan karena pengalihan anggaran adalah bukti nyata dari kegagalan institusional dalam memfasilitasi transformasi digital. Akibatnya, UMKM di Desa Panyirapan cenderung tetap berskala kecil, memiliki ketergantungan tinggi pada pasar lokal yang terbatas dan perantara, serta kehilangan potensi untuk menjangkau pasar yang lebih besar dan lebih menguntungkan.



Gambar 3. Salah satu tempat usaha kecil warga Desa Panyirapan

Meskipun demikian, ditemukan adanya infrastruktur institusional yang berperan sebagai mitigasi, yaitu melalui BUMDes. Program BUMDes yang memungkinkan petani melakukan pembayaran kewajiban setelah panen merupakan sebuah katup pengaman finansial yang sangat membantu menjaga arus kas petani (Ibrahim et al., 2023). Namun, keberadaan BUMDes ini belum cukup untuk memaksimalkan potensi ekonomi desa secara keseluruhan. Potensi desa sebagai lumbung pangan lokal, yang bahkan dinilai mampu menyuplai program skala besar seperti Makan Siang Gratis, masih belum terorganisir dengan baik. Besarnya potensi dari sumber mata air yang melimpah yang belum terkelola untuk irigasi modern serta program ketahanan pangan dari budidaya ikan dan hidroponik yang berjalan parsial merupakan sebuah biaya peluang (*opportunity cost*) yang sangat besar. Artinya, desa tidak hanya menderita kerugian akibat inefisiensi, tetapi juga kehilangan potensi pendapatan baru yang signifikan karena ekosistem ekonominya belum terintegrasi oleh infrastruktur yang memadai.

Strategi Peningkatan Infrastruktur

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap kondisi dan dampak infrastruktur, maka dirumuskan sebuah strategi peningkatan yang bersifat holistik, terintegrasi, dan berorientasi pada penyelesaian akar masalah. Fondasi utama dari strategi ini adalah peningkatan konektivitas fisik dan digital untuk membuka isolasi rantai pasok ekonomi. Langkah paling mendesak adalah memprioritaskan penyelesaian sisa 25% infrastruktur jalan yang paling kritis, yaitu perkerasan jalan usaha tani. Intervensi ini secara langsung menjawab keluhan utama petani mengenai lonjakan biaya logistik hingga 100% yang selama ini menggerus profitabilitas mereka. Pelaksanaannya direkomendasikan melalui skema padat karya tunai untuk memberikan dampak ekonomi ganda berupa upah bagi pekerja lokal. Namun, konektivitas fisik ini harus diimbangi dengan konektivitas digital. Belajar dari kegagalan rencana pembuatan aplikasi UMKM akibat pengalihan anggaran, strategi ini menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur digital yang nyata. Pemerintah desa didorong untuk secara proaktif menjalin kemitraan dengan penyedia layanan swasta atau memanfaatkan program pemerintah seperti BAKTI Kominfo untuk penguatan sinyal internet, sehingga membuka gerbang bagi pelaku UMKM untuk mengakses pasar yang lebih luas dan meningkatkan daya saing produk lokal Makanan Ringan dan Budidaya Ikan.



Gambar 4. Tempat budi daya ikan salah satu warga Desa Panyirapan

Setelah fondasi konektivitas terbangun, langkah selanjutnya adalah membangun mesin penggerak ekonomi lokal melalui penguatan kelembagaan yang sudah ada. Strategi ini berpusat pada pembangunan sebuah pasar desa yang representatif, yang berfungsi sebagai "wadah" fisik untuk memotong rantai distribusi, mengurangi ketergantungan pada tengkulak, dan menjadi etalase produk unggulan desa. Namun, keberadaan pasar fisik tidak akan berarti tanpa pengelola yang andal. Oleh karena itu, peran BUMDes akan diperluas secara signifikan (Amanda & Kawedar, 2023). Memanfaatkan keberhasilannya dalam mengelola skema kredit pasca-panen yang pro-petani, BUMDes akan diposisikan sebagai manajer utama pasar desa. Lebih jauh, BUMDes akan bertindak sebagai agregator yang menghubungkan produksi para petani dan peternak dengan peluang pasar yang lebih besar, termasuk menjadi penyedia utama untuk program ketahanan pangan seperti suplai untuk Makan Siang Gratis. Dengan demikian, BUMDes bertransformasi dari sekadar unit usaha menjadi jantung dari ekosistem ekonomi Desa Panyirapan.

Pada akhirnya, keseluruhan strategi ini dibingkai dalam kerangka pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan inklusif. Aspek keberlanjutan diwujudkan melalui optimalisasi sumber daya alam yang melimpah namun belum tergarap, yaitu dengan mengembangkan sistem pengelolaan air bersih perpipaan dari sumber mata air yang ada. Program ini memiliki manfaat ganda: meningkatkan derajat kesehatan dan sanitasi warga, sekaligus membuka potensi untuk irigasi pertanian yang lebih efisien. Aspek inklusivitas sosial dijawab dengan mengembangkan program Posyandu Lansia, untuk memastikan bahwa kelompok masyarakat lanjut usia tidak tertinggal dan mendapatkan layanan kesehatan yang layak, melengkapi layanan Posyandu Ibu dan Anak yang sudah berjalan baik. Seluruh implementasi strategi ini akan bertumpu pada mekanisme Musyawarah Desa yang otentik dan partisipatif sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi. Sumber pendanaan akan dioptimalkan dari Dana Desa, sambil secara aktif menyusun proposal untuk mengakses dana APBD Kabupaten dan untuk pertama kalinya, menjalin kemitraan strategis dengan pihak swasta melalui program CSR (Dana & Dan, 2023).

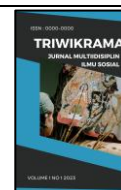
4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi peningkatan infrastruktur yang paling efektif untuk mendorong perekonomian di Desa Panyirapan bukanlah pembangunan fisik secara sporadis, melainkan sebuah pendekatan strategis yang terintegrasi, partisipatif, dan berbasis pada potensi lokal. Ditemukan adanya paradoks pembangunan, di mana capaian kuantitas infrastruktur

*Corresponding author

E-mail addresses: zukhrufii@gmail.com



pemukiman (75% jalan beton) tidak diimbangi dengan kualitas infrastruktur produksi (jalan usaha tani) yang justru menjadi penghambat utama. Kesenjangan ini secara langsung menyebabkan inefisiensi ekonomi yang signifikan, seperti kenaikan biaya logistik pertanian hingga 100% dan terhambatnya pertumbuhan UMKM akibat isolasi digital.

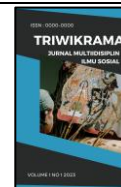
Lebih lanjut, disimpulkan bahwa Desa Panyirapan memiliki modal internal yang kuat berupa sumber daya alam (mata air), modal sosial (semangat swadaya masyarakat), dan modal institusional (BUMDes yang aktif), namun lemah dalam mengintegrasikan potensi tersebut dan membangun jaringan eksternal. Oleh karena itu, strategi yang dirumuskan tidak hanya menyentuh perbaikan fisik, tetapi juga penguatan kelembagaan BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi, pembangunan ekosistem pasar, serta peningkatan inklusivitas sosial untuk memastikan manfaat pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kasus Desa Panyirapan menunjukkan bahwa transformasi ekonomi desa menuntut pergeseran paradigma dari sekadar "proyek infrastruktur" menjadi "pembangunan ekosistem" yang sinergis.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka diajukan beberapa saran praktis yang saling berkaitan. Bagi Pemerintah Desa Panyirapan, disarankan untuk segera melakukan realokasi fokus anggaran Dana Desa guna memprioritaskan perkerasan jalan usaha tani yang menjadi penghambat utama ekonomi. Secara kelembagaan, Pemerintah Desa perlu memperkuat peran BUMDes sebagai motor penggerak utama, dengan memberikannya mandat untuk merancang dan mengelola pasar desa yang akan dibangun. Selain itu, desa harus lebih proaktif dalam menjalin kemitraan eksternal, baik dengan pihak swasta untuk program CSR maupun dengan penyedia layanan telekomunikasi untuk mengatasi kesenjangan digital. Untuk memastikan pembangunan yang inklusif, perlu diinisiasi program rintisan seperti Posyandu Lansia. Saran ini akan lebih optimal jika didukung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang diharapkan dapat memberikan pendampingan teknis dan manajerial, serta berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan desa dengan potensi mitra strategis. Terakhir, bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mendalami topik ini melalui analisis kuantitatif seperti studi kelayakan ekonomi, melakukan studi komparatif dengan desa lain, atau merancang penelitian longitudinal untuk mengukur dampak jangka panjang dari implementasi strategi yang direkomendasikan dalam penelitian ini.

5. DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Ngurah Gede, W. (2022). Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Berwawasan Lingkungan di Indonesia. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 6(3), 262-275.
<https://doi.org/10.29244/jp2wd.2022.6.3.262-275>
- Amanda, S., & Kawedar, W. (2023). Strategi Bumdes Dalam Meningkatkan Pades Di Desa Punjulharjo Kabupaten Rembang Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Accounting*, vol 12(2), 1-15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Bender, D. (2016). DESA - Optimization of variable structure Modelica models using custom annotations. *ACM International Conference Proceeding Series*, 18-April-2(1), 45-54.
<https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Citriadin, Y. (2020). *Teknik analisis data penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif dalam metodologi penelitian pendekatan multidisipliner* (hal. 201-218).
- Dana, P., & Dan, D. (2023). Pengelolaan Dana Desa Dan Dampaknya Terhadap Indeks Desa Membangun Di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 4(1), 51-71.



<https://doi.org/10.33105/jmp.v4i1.486>

- Febriani, R., & Samudra, S. (2023). IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DESA SEBAGAI UPAYA MENUJU KEMANDIRIAN DESA KOTARINDAU. *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(1), 367. <https://doi.org/10.33603/publika.v11i1.8518>
- Hamzah, A. (2022). Strategi Pengembangan Umkm Desa Cibingbin Menuju Entrepreneurs Village Berbasis Sumberdaya Alam. *Jurnal Pengabdian Dinamika*, 9(2), 36. <https://doi.org/10.62870/dinamika.v9i2.17860>
- Ibrahim, A., Canon, S., & Sudirman, S. (2023). Pengaruh Alokasi Dana Desa Dan Pengembangan BUMDes Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Journal of Economic and Business Education*, 1(2), 193-201. <https://doi.org/10.37479/jebe.v1i2.19310>
- Ilhami, M. W., Vera Nurfajriani, W., Mahendra, A., Sirodj, R. A., & Afgani, W. (2024). Penerapan Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(9), 462-469. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11180129>
- Komparasiperspektif, S., & Seth, H. (1986). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* , Vol 1 Tahun 1986 *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* , Vol 1 Tahun 1986. 1(1).
- Mahadiansar, M., Ikhsan, K., Sentanu, I. G. E. P. S., & Aspariyana, A. (2020). Paradigma Pengembangan Model Pembangunan Nasional Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 17(1), 77-92. <https://doi.org/10.31113/jia.v17i1.550>
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145-151. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Ni Putu Indriyani, Piers Andreas Noak, I. P. D. Y. (2018). Analisis Pembangunan Desa Melalui Pemberdayaan Masyarakat (Studi Di Desa Dauh Peken Kec. Tabanan Kab. Tabanan). *Dedikasi: Journal of Community Engagment*, 2, 1-8.
- Putri, A. A., Aryazeta, A. A., Fu'ad, Z., Ismikarimah, Devi, Y., & Kurniati, E. (2024). Neraca TEORI-TEORI PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 3(1), 182-192. <http://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca>
- Wijaya, M. R. (2020). Pemanfaatan Dana Desa Berbasis Partisipasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam Di Kabupaten Lampung Timur. *Disertasi*, 1-363.